

RELASI ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG EKONOMI DENGAN KINERJA PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINJAI

Ilyas¹, Akmad Firman², La Ode Anto³, Inayati Nuraini Dwiputri⁴, Isalman⁵

¹⁻² Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

⁴ Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

⁵ Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

*E-mail korespondensi : ilyasalimuddin86@gmail.com

Informasi Artikel

Received: 17 Oct 2019

Revised : 27 Oct 2019

Accepted : 08 Dec 2019

Online: 30 Dec 2019

Keywords: Government Policy, Economy, Education Performance, HDI.

Tipe Artikel : Research paper



Diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Attahiriyah

ABSTRACT

This study aims to find the relationship between government policies in education and education performance in Sinjai District. The research method used is quantitative research. The main data source comes from the publication of the Central Statistics Bureau (BPS) of Sinjai Regency and other publications related to writing. Analysis of the data used is quantitative descriptive. The results of the analysis show that government policies are very influential or have a positive relationship to improving educational performance. This study also shows that the performance of education in Sinjai District as seen from the Human Development Index (HDI) component in the last five years (2014-2018) has increased, although it is still slow. The still increase in HDI in Sinjai Regency requires the Regional Government to formulate various strategies, create programs and formulate policies that are truly able to accelerate the improvement of educational performance in the Sinjai Regency.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kinerja pendidikan di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data utama berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai dan publikasi lain yang berkaitan dengan penulisan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sangat berpengaruh atau memiliki hubungan positif dengan peningkatan kinerja pendidikan. Studi ini juga menunjukkan bahwa kinerja pendidikan di Kabupaten Sinjai dilihat dari komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam lima tahun terakhir (2014-2018) telah meningkat, meskipun masih lambat. Pemerintah Daerah untuk merumuskan berbagai strategi, membuat program dan merumuskan kebijakan yang benar-benar mampu mempercepat peningkatan kinerja pendidikan di Kabupaten Sinjai.

Pedoman Sitasi : Ilyas, I., Firman, A., La Ode Anto, Dwiputri, I.A., & Isalman, I. (2019). RELASI ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG EKONOMI DENGAN KINERJA PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 675-682

1. Pendahuluan

Peningkatan kualitas manusia menjadi tema sentral dalam pembangunan terkini. Indikator kualitas manusia tercermin dalam tiga dimensi utama yakni indikator pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, indikator kesehatan yang diukur dengan indikator angka harapan hidup serta ekonomi yang dilihat dari paritas daya beli. Ketiga dimensi utama pembangunan ini lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan paradigma pembangunan yang menjadikan manusia sebagai epicentrum pembangunan merupakan sebuah langkah yang sangat tepat. Karenanya untuk melihat bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintah apakah baik atau buruk maka yang menjadi rujukan utama adalah bagaimana capaian-capaian pembangunan atas kualitas manusia. Perubahan paradigma pembangunan tersebut kemudian dijawantahkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Hal ini tampak jelas dari paparan visi-misi Pemerintah Daerah yang menjadikan pendidikan, kesehatan, serta agama sebagai tiga pilar pembangunan di Kabupaten Sinjai (Ilyas, 2015)

Dipilihnya pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan tidak lepas dari kesadaran bahwa pendidikan merupakan katalisator dan mediator utama untuk meningkatkan dan mengakselerasi pembangunan. Negara-negara yang maju secara ekonomi selalu identik dengan kemajuan di bidang pendidikannya. Pelajaran dari negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Negara-Negara Eropa Barat, China termasuk negeri jiran Singapore dan Malaysia memperlihatkan bahwa semua kemajuan yang didapatkan tidak dapat dilepaskan dari investasi mereka yang sangat besar terhadap pendidikan. Kajian yang dilakukan oleh Sal Diba (2018) di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa belanja bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM di daerah tersebut.

Pendukung pandangan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti, seperti Ranjaan (2008), Cooray (2009) dalam Ilyas, 2015) menyimpulkan bahwa ekspansi pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sinjai tahun 2013-2018, telah menempatkan pembangunan pendidikan sebagai visi-misi, substansi, tujuan utama dan sasaran pembangunan daerah. Pembangunan pendidikan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat dilihat pada peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah serta Angka Melek Huruf masyarakat. Dalam RPJMD 2013-2018 tertuang jelas visi yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik. Unggul dalam kualitas hidup adalah kondisi dimana masyarakat Sinjai berposisi terdepan dalam kemajuan pendidikan dan kesehatan (Perda Kabupaten Sinjai Nomor 16 tahun 2013).

Keseriusan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terlihat jelas dari kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebagai pelopor pendidikan gratis di Indonesia. Dengan program pendidikan gratis ini maka biaya pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Selain itu dapat pula dilihat pada alokasi belanja pemerintah untuk bidang pendidikan yang sudah lebih dari 20% setiap tahun atau dengan kata lain sudah melebihi dari apa yang diisyaratkan oleh UU Sisdiknas dimana belanja bidang pendidikan dipatok minimal 20% dari APBN atau APBD. Hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Komang & Putu, 2017).

Namun demikian meski belanja pemerintah bidang pendidikan sudah tinggi akan tetapi capaian IPM Kabupaten Sinjai masih cukup rendah, bahkan kalau melihat persentase peningkatannya ternyata sangat lambat dibanding kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika membandingkan posisi IPM Kabupaten Sinjai dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa IPM Kabupaten Sinjai masih berada

dibawah. Misalnya saja untuk tahun 2018 IPM Kabupaten Sinjai sebesar 66,24 sementara IPM provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,90. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun strategi terbaik untuk mengakselerasi peningkatan IPM. Minimal setara dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Ekonomi neoklasik membuat tiga asumsi dalam mendefinisikan pendekatan teori modal manusia. Pertama, mengadopsi paradigma antropologi *homo economicus*, yang mendefinisikan manusia sebagai sangat rasional mampu mencakup emosi dan cita-cita dalam perhitungan memaksimalkan utilitas. Kedua, mengasumsikan ada hubungan antara modal manusia dan keuntungan ekonomi. Hal ini didasari akan adanya efek kausal dari modal manusia pada produktivitas ekonomi dan mengasumsikan bahwa investasi pendidikan adalah jalan untuk mobilitas sosial ekonomi. Dengan kata lain, mereka yang berinvestasi tinggi di sektor pendidikan pasti akan mencapai kemajuan sosial ekonomi yang tinggi pula, sementara mereka yang berinvestasi minim dalam pendidikan akan menuai imbalan sosial ekonomi yang minim pula. Secara teoritis, tampaknya logis bahwa semakin besar investasi di modal manusia, semakin besar keuntungan yang akan kembali didapatkan. Ketiga, mengasumsikan prinsip maksimisasi utilitas dan stabilitas preferensi individu. Prinsip maksimalisasi utilitas menganggap bahwa manusia hanya terlibat dalam kegiatan di mana mereka dapat memaksimalkan keuntungan material mereka. (Sandona, 2013).

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga dan merupakan hal yang sangat fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2009).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris mengenalkan *Physical Quality of Life Indeks* (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup (IKH). IKH merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: tingkat harapan hidup, angka kematian dan angka melek huruf. Sejak tahun 1990 United Nations for Development Program (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*).

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemerintah dengan kinerja bidang pendidikan baik nasional maupun internasional telah dilakukan dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Munda *et al* (2014) melakukan penelitian di Negara Kenya mengungkapkan bahwa pencapaian kinerja pendidikan terkait dengan tujuan pembangunan milenium di Kenya sebagian besar tergantung pada ketersediaan dan penggunaan yang tepat dari sumber daya pendukung untuk penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan pada $\alpha = 0,5$ ditemukan juga bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara unit belanja dengan kinerja bidang pendidikan dan upaya Pemerintah untuk memberikan subsidi keuangan untuk pendidikan masih belum cukup untuk kelompok masyarakat yang rentan putus sekolah (masyarakat miskin yang kurang beruntung yang tidak membiayai pendidikan mereka sendiri).

Sal Diba et al. (2018) melakukan penelitian di Kabupaten Halmahera Utara dan mendapat kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki tanda positif namun kurang berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Halmahera Utara.

3. Metodologi

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah seperti buku-buku, makalah, artikel, internet, laporan-laporan dan kepustakaan lainnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur serta publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif ini terdiri dari dua langkah yakni memaparkan fenomena atau permasalahan yang terjadi kemudian memberikan gambaran atau deskripsi atas fenomena tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang relevan atau data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut telah terkumpul kemudian dilakukan reduksi data yakni upaya memilih dan memilah data yang betul-betul relevan serta membuang data-data yang tidak perlu. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak semua data memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini selain itu dengan reduksi data yang baik akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis serta keakuratan hasil penelitian lebih terjamin.

Selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Data yang disajikan harus menarik sehingga mudah mencermatinya, serta memudahkan dalam menginterpretasikan data tersebut. Langkah terakhir yang dilakukan adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dalam penyajian data serta interpretasi atas data tersebut akan terlihat pola, model, hubungan, persamaan dan sebagainya. Dengan mencermati hal tersebut dapat diambil kesimpulan atau keputusan atas penelitian yang telah dilakukan.

4. Hasil dan Diskusi

Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan

Ada banyak kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya adalah kebijakan fiskal atau anggaran belanja, serta penyusunan program kerja atau kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan pendidikan dan pelatihan, bantuan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, akses pendidikan yang lebih mudah dan murah serta berkualitas, membangun perpustakaan dan lain-lain.

Selain itu intervensi pemerintah yang sangat vital adalah kebijakan anggaran. Belanja pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakat dan menuju pertumbuhan ekonomi. Belanja Pemerintah terhadap bidang pendidikan merupakan bagian dari belanja pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Rate of return* investasi dalam bidang pendidikan sangat tinggi terutama untuk negara-negara berkembang maupun negara miskin dimana suplai tenaga terdidik relatif sangat sedikit.

Kinerja Bidang Pendidikan

Pengukuran terhadap kinerja merupakan hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana organisasi berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu. Kinerja (*performance*) merupakan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kinerja atau hasil kerja. Letangule *et al*

(2012, dalam Ilyas, 2015) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja bertujuan untuk mencapai objektivitas, informasi yang relevan dalam kinerja organisasi atau program yang dapat digunakan untuk memperkuat manajemen, sebagai informasi untuk pembuatan keputusan, mencapai hasil dan mengembangkan kinerja secara keseluruhan, dan meningkatkan *accountability*. Dalam rencana strategis pendidikan nasional disebutkan bahwa kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai

Pencapaian IPM merupakan cerminan keberhasilan pembangunan manusia di sebuah daerah atau negara. Semakin tinggi nilai IPM yang dicapai berarti semakin tinggi pula kualitas manusia yang dimiliki oleh negara atau daerah tersebut. Begitupun sebaliknya. Karena itu capaian IPM ini bisa dijadikan referensi untuk menilai kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. capaian IPM yang tinggi merupakan cerminan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. sebaliknya IPM yang rendah adalah bukti bahwa pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah masih rendah. Berikut ini tabel tentang IPM Kabupaten Sinjai dari tahun 2014 sampai 2018.

Tabel 1. IPM Sinjai 2014-2018

Tahun	IPM Sinjai	IPM Sulsel
2014	63,83	68,49
2015	64,48	69,15
2016	65,36	69,76
2017	65,80	70,34
2018	66,24	70,90

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel di atas terlihat bahwa IPM Kabupaten Sinjai dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 IPM Sinjai adalah 63,83 dan pada tahun 2018 sudah mencapai 66,24. Dalam lima tahun mengalami peningkatan sebesar 2,41 poin. Kondisi peningkatan IPM ini adalah sebuah prestasi dan patut diapresiasi.

Namun demikian jika dikomparasikan dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat jelas bahwa IPM Kabupaten Sinjai masih berada di bawah. Pada tahun 2018 IPM Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,90 sementara IPM Kabupaten Sinjai baru di angka 66,24. Selisihnya sebesar 4.66 poin. Sementara jika melihat dari peningkatannya masing-masing, baik IPM Kabupaten Sinjai maupun IPM Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar 2,41 poin.

Dari data di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai harus menyusun strategi terbaik untuk mengakselerasi peningkatan IPM. Minimal setara dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk mengukur kinerja pendidikan dalam indikator terbaru digunakan ukuran rata-rata lama sekolah (MYS) dan harapan lama sekolah (EYS). Semakin lama MYS maupun EYS maka semakin bagus pula pencapaian kinerja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. sebaliknya semakin singkat MYS maupun EYS maka semakin buruk pula kinerja pendidikan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah wajib berusaha untuk meningkatkan kedua indikator tersebut. Tabel berikut ini memperlihatkan perkembangan Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai dari tahun 2014-2018.

Tabel 2. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018

Tahun	Harapan lama sekolah Sinjai (EYS)	Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai (MYS)
2014	11,96	7,03
2015	12,34	7,05
2016	12,83	7,06
2017	12,84	7,28
2018	12,85	7,29

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Meskipun peningkatannya masih sangat lambat. Untuk EYS, dari tahun 2014 sebesar 11,96 tahun menjadi 12,85 tahun pada tahun 2018. Peningkatannya sebesar 0,89 tahun. Sementara itu, MYS peningkatannya dari 7,29 tahun pada tahun 2018 yang sebelumnya 7,03 tahun pada tahun 2014.

Peningkatan EYS dan EMS di Kabupaten Sinjai lebih banyak disebabkan oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kinerja pendidikan. Sebutlah misalnya alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD dari dulu pemerintah Sinjai telah merealisasikannya. Program lainnya adalah beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi. Selain itu kebijakan pendidikan gratis yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Sinjai sejak awal tahun 2000an telah menunjukkan hasil yang baik.

Selain itu fakta dari tabel di atas menunjukkan peningkatan dua komponen yang masih lambat karenanya diperlukan berbagai program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan EYS dan MYS Kabupaten Sinjai.

Relasi antara Kebijakan Pemerintah dengan Kinerja Pendidikan

Kinerja bidang pendidikan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat karena pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas IPM. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas IPM itu sendiri adalah meningkatkan kinerja pendidikan. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tidak akan pernah lepas dari menjadikannya sebagai sektor prioritas dengan langkah konkret meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan. Pelayanan publik bidang pendidikan yang paling elementer adalah pendidikan dasar, yang oleh Pemerintah diterjemahkan sebagai wajib belajar sembilan tahun.

Menurut Brata (2004) dalam (Ilyas, 2015)Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia memiliki hubungan yang reciprocal (timbang balik).Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan manusia dan sebaliknya pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa ada hubungan timbal balik antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi dapat dan selalu mendorong meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan standar nutrisi. Di sisi yang lain investasi pada pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja (Perkins et al., 2001).

5. Keterbatasan Studi

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya melihat relasi kebijakan pemerintah terhadap kinerja pendidikan, padahal secara teori ada banyak variabel yang memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Untuk penelitian selanjutnya bisa memasukkan variabel lain yang bisa berpengaruh terhadap kinerja pendidikan selain variabel kebijakan pemerintah.

6. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil kinerja pendidikan di kabupaten sinjai serta relasi antara kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi terhadap kinerja pendidikan di kabupaten sinjai. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan pemerintah bidang ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pendidikan. Di kabupaten sinjai sendiri sangat konsisten dalam membuat kebijakan yang sangat mendorong peningkatan kinerja pendidikan. Namun demikian, jika merujuk pada posisi ipm, meski terus mengalami peningkatan namun demikian peningkatannya belum akseleratif.

Berdasarkan kesimpulan itu maka implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah masih harus menyusun berbagai strategi, membuat program dan merumuskan kebijakan yang betul-betul mampu mengakselerasi peningkatan kinerja pendidikan di kabupaten sinjai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO yang sangat membantu dan mendukung seluruh dosen di lingkup fakultas untuk memperbanyak publikasi. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UHO serta seluruh rekan-rekan sejawat telah banyak membantu, berdiskusi dan berbagi ilmu dan pengalaman. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Ketua dan Sekretaris serta seluruh pengurus ISEI Cabang Kendari Periode 2018-2021. Terkhusus kepada seluruh keluarga penulis yang sangat mendukung seluruh aktivitas penulis selama ini.

REFERENSI

- BPS. (2013). Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2013. Sinjai: BPS Sinjai.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Eko, S. (2010). Desentralisasi dan Penanggulangan Kemiskinan, Pelajaran dari Enam Daerah. Dalam A Prasetyantoko., Bahagijo, Sugeng., Budiantoro, Setyo (Eds). *Pembangunan Inklusif, Prospek dan Tantangan Indonesia* (hlm. 347-403). Jakarta: LP3ES.
- Sasana, H. (2009). *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol10, No. 1, Juni 2009, hal. 103-124
- Halim, Al. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilyas. (2015). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai*. Tesis Unhas.
- Jhingan, M.L. (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1 Nomor 1, April 2012. Hal 140-164.
- Komang, I. G, Dianaputra, A., & Putu, L. A. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 6 No. 3
- Lubis, A. Z. A. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Publik Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Pada Negara-Negara Asean-4). *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Mulyaningsih, Y. (2008). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Musgrave, R. A & Musgrave, P.G. (1989). *Public Finance In Theory and Practise*. Fifth edition. McGraw-Hill Book, international Edition 1989.
- Nursini. (2012). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Teori dan Aplikasi*. Makassar: PPKED-FEUIH.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Sandonà, L., & Aladi, U. (2013). Broadening neoclassical human capital theory for the attainment of integral human development. *Journal of Markets & Morality*, 16(1), 25-37.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). Pembangunan Ekonomi, Jilid 1, Edisi 9. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, T. (2006). Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.